

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,

Petugas Verifikator,

EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

ARIA ISPRADANA, S.Kom
NIP. 19940916 202202 2 001

Mengetahui,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat kami susun. Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat memberi manfaat, dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 5 Juni 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN VERIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	18
3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	18
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPRD Tahun 2025.....	23
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	6
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3 Capaian Kegiatan pada Triwulan I Sekretariat DPRD.....	8
Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2025.....	12
Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2025.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2025 dengan pagu APBD Tahun 2025.
- b. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

Sekretariat DPRD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 melalui tahapan – tahapan :

- 1). Persiapan penyusunan;
- 2). Penyusunan rancangan awal;
- 3). Penyusunan rancangan;

4). Perumusan rancangan akhir;

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja (DPRD Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN
2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan tahun kedua penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja program Sekretariat DPRD disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d TW I 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD secara Optimal	Persentase Peningkatan dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	9,66	9,66	
a	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di bahas	%	100	0	0,00	
		Persentase Kegiatan Pokok Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	95	100	100,00	
		Persentase Kegiatan DPRD yang di Publikasikan	%	100	60	60,00	
		Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	33,333333	33,33	

Sumber : IKPD Sekretariat 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator program Sekretariat DPRD faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Kegiatan pada Triwulan I Sekretariat DPRD

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp.)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw I (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Pering kat Kinerja
		Renja	APBD		Tar get	Reali sasi	Capaia n (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	51.202.595.629	58.348.143.119					
	SEKRETARIAT DPRD	51.202.595.629	58.348.143.119					
	Sekretariat DPRD	51.202.595.629	58.348.143.119					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	31.521.979.724	35.890.467.568	3.651.423.366,00	-	-	-	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.999.110	2.888.934.123	369.612.474,00	-	-	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.999.110	2.888.934.123	369.612.474,00	25	15	60	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.115.300	614.380.300	23.008.500,00	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	400.000,00	12	6	50	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.602.300	27.602.300	0,00	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.550.000	22.550.000	0,00	-	-	-	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	0,00	10	8	80	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	84.265.000	14.680.000,00	12	7	58	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.963.000	449.963.000	7.928.500,00	60	15	25	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	185.735.000	0,00	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	185.735.000	0,00	2	1	50	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0	0,00	5	2	40	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.888.694	888.088.694	130.760.008,00	-	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000	8.760.000	2.591.000,00	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	9.794.483,00	12	4	33	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.328.694	769.328.694	118.374.525,00	12	3	25	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.959.740	834.959.740	46.972.130,00	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.959.740	599.959.740	40.426.400,00	30	10	33	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	85.000.000	0,00	2	1	50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000	6.325.730,00	10	2	20	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	220.000,00	20	4	20	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.013.948.380	30.096.301.211	3.047.778.254,00	-	-	-	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.332.948.480	29.415.301.311	3.039.568.254,00	45	15	33	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	590.999.900	590.999.900	8.210.000,00	45	18	40	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000	90.000.000	0,00	45	10	22	

Layanan Administrasi DPRD	382.068.500	382.068.500	33.292.000,00	-	-	-	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.068.500	100.068.500	9.792.000,00	12	4	33	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	282.000.000	23.500.000,00	12	4	33	
PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	0	0	0,00	-	-	-	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.640.702.530	6.272.330.500	43.780.000,00	-	-	-	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.139.206.630	2.250.298.000	43.780.000,00	17	10	59	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	505.302.500	2.533.852.500	0,00	5	4	80	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	996.193.400	1.488.180.000	0,00	10	5	50	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	638.982.000	799.030.000	0,00	-	-	-	
Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	261.687.000	0,00	1	0.25	25	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.505.000	261.691.000	0,00	1	0.25	25	
Pembahasan APBD	112.986.000	137.826.000	0,00	1	1	100	

Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	137.826.000	0,00	1	1	100	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	184.000.000	184.000.000	12.400.000,00	-	-	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.000.000	44.000.000	2.600.000,00	40	12	30	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	44.000.000	2.200.000	40	15	38	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	44.000.000	4.800.000	40	20	50	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	52.000.000	2.800.000	40	13	33	
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.338.000.000	3.363.938.751	103.277.000,00	-	-	-	
Pendalaman Tugas DPRD	2.927.000.000	2.927.000.000	44.840.000,00	6	2	33	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	225.000.000	222.171.600	36.481.000,00	7	2	29	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	186.000.000	214.767.151	21.956.000,00	12	4	33	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.685.225.700	1.685.225.700	14.960.000,00	-	-	-	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.000.000	125.000.000	0,00	2	2	100	

Pelaksanaan Reses	1.560.225.700	1.560.225.700	14.960.000,00	3	1	33	
Fasilitasi Tugas DPRD	10.193.705.675	10.153.150.600	73.428.800,00	-	-	-	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.193.705.675	10.153.150.600	73.428.800,00	60	20	33	

Sumber : Sekretariat DPRD 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan subkegiatan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan mayoritas pada Triwulan III dan IV, sehingga waktu yang tersisa untuk Pelaksanaan relative sempit;
- b. Keterlambatan pelaksanaan oleh pihak ketiga, terutama untuk kegiatan yang dijadwalkan mulai bulan Juni ke atas, mengakibatkan mundurnya jadwal dan berkurangnya efektivitas kegiatan;
- c. Adanya kebijakan baru terkait belanja makan minum, yang menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada pencapaian output yang direncanakan;
- d. Penerapan efisiensi anggaran, yang membatasi ruang fisik untuk pelaksanaan kegiatan secara penuh, sehingga mempengaruhi volume dan kualitas output yang dapat dicapai.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPRD ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Awal DPRD Tahun 2025 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja DPRD Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2025

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub II)		Renja	APBD (Perbub II)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	51.202.595.629	48.962.662.482,00	48.962.662.482,00	(2.239.933.147)	-	
	SEKRETARIAT DPRD	51.202.595.629	48.962.662.482,00	48.962.662.482,00			
	Sekretariat DPRD	51.202.595.629	48.962.662.482,00	48.962.662.482,00			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	31.521.979.724	35.398.636.174,00	35.398.636.174,00			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.999.110	2.579.999.110,00	2.579.999.110,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.999.110	2.888.934.123,00	2.888.934.123,00			
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.115.300	614.380.300,00	614.380.300,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	7.000.000,00	7.000.000,00			

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.602.300	21.722.270,00	21.722.270,00			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.550.000	13.530.000,00	13.530.000,00			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00			
Fasilitas Kunjungan Tamu	110.000.000	75.838.500,00	75.838.500,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.963.000	224.987.300,00	224.987.300,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	185.735.000,00	185.735.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	74.083.000,00	74.083.000,00			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0,00	0,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.888.694	888.088.694,00	888.088.694,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000	7.080.000,00	7.080.000,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000,00	110.000.000,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.328.694	749.137.797,00	749.137.797,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	894.959.740	834.959.740,00	834.959.740,00			

Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.959.740	550.735.766,00	550.735.766,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	83.474.300,00	83.474.300,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	93.096.400,00	93.096.400,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	24.952.007,00	24.952.007,00			
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.013.948.380	30.096.301.211,00	30.096.301.211,00			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.332.948.480	29.415.301.311,00	29.415.301.311,00			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	590.999.900	581.762.900,00	581.762.900,00			
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000	85.700.500,00	85.700.500,00			
Layanan Administrasi DPRD	382.068.500	382.068.500,00	382.068.500,00			
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.068.500	89.300.000,00	89.300.000,00			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	282.000.000,00	282.000.000,00			

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.680.615.905,00	13.564.026.308,00	13.564.026.308,00			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.640.702.530	6.272.330.500,00	6.272.330.500,00			
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.139.206.630	1.271.353.132,00	1.271.353.132,00			
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	505.302.500	1.835.174.300,00	1.835.174.300,00			
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	996.193.400	755.529.600,00	755.529.600,00			
Pembahasan Kebijakan Anggaran	638.982.000	1.271.353.132,00	1.271.353.132,00			
Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	151.517.800,00	151.517.800,00			
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.505.000	156.239.800,00	156.239.800,00			
Pembahasan APBD	112.986.000	81.927.500,00	799.030.000,00			
Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	82.097.500,00	82.097.500,00			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	184.000.000	184.000.000,00	184.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.000.000	22.000.000,00	22.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	22.000.000,00	22.000.000,00			

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	22.000.000,00	22.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	26.000.000,00	26.000.000,00			
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.338.000.000	3.363.938.751,00	3.363.938.751,00			
Pendalaman Tugas DPRD	2.927.000.000	2.201.606.800,00	2.201.606.800,00			
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	225.000.000	222.171.600,00	222.171.600,00			
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	186.000.000	164.258.326,00	164.258.326,00			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.685.225.700	1.685.225.700,00	1.685.225.700,00			
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	125.000.000	85.164.800,00	85.164.800,00			
Pelaksanaan Reses	1.560.225.700	1.388.409.850,00	1.388.409.850,00			
Fasilitasi Tugas DPRD	10.193.705.675	10.153.150.600,00	10.153.150.600,00			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.193.705.675	5.076.575.300,00	5.076.575.300,00			

Sumber : Sekretariat DPRD 2025

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2025, maka total anggaran Rp 48.962.662.482 ,Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja : Rp 51.202.595.629
2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) : Rp 48.962.662.482
3. Pagu Perubahan : Rp 48.962.662.482
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp (2.239.933.147)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD : Rp -

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:
Penyesuaian pagu sub kegiatan Renja terhadap pagu sub kegiatan APBD;

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:
Penggесeran pagu antar sub kegiatan.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPRD Tahun 2025

Rincian rencana Perubahan Renja DPRD Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan DPRD
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang (+/-)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					51.202.595.629,00	58.039.208.106,00				48.962.662.482,00	(2.239.933.147)	(9.076.545.624)			
	SEKRETARIAT DPRD					51.202.595.629,00	58.039.208.106,00				48.962.662.482,00					
	Sekretariat DPRD					51.202.595.629,00	58.039.208.106,00				48.962.662.482,00					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah				31.521.979.724,00	35.581.532.555,00				35.398.636.174,00					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.579.999.110,00	2.579.999.110,00				2.579.999.110,00					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.579.999.110,00	2.579.999.110,00				2.888.934.123,00					
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					640.115.300,00	614.380.300,00				614.380.300,00					

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.000.000,00	10.000.000,00				7.000.000,00				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27.602.300,00	27.602.300,00				21.722.270,00				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				22.550.000,00	22.550.000,00				13.530.000,00				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan				20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				110.000.000,00	84.265.000,00				75.838.500,00				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				449.963.000,00	449.963.000,00				224.987.300,00				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					100.000.000,00	185.735.000,00				185.735.000,00				

Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				50.000.000,00	185.735.000,00				74.083.000,00				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50.000.000,00	0,00				0,00				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					910.888.694,00	888.088.694,00				888.088.694,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.760.000,00	8.760.000,00				7.080.000,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				110.000.000,00	110.000.000,00				110.000.000,00				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				792.128.694,00	769.328.694,00				749.137.797,00				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					894.959.740,00	834.959.740,00				834.959.740,00				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				659.959.740,00	599.959.740,00				550.735.766,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				85.000.000,00	85.000.000,00				83.474.300,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				125.000.000,00	125.000.000,00				93.096.400,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				25.000.000,00	25.000.000,00				24.952.007,00			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					26.013.948.380,00	30.096.301.211,00				30.096.301.211,00			

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD				25.332.948.480,00	29.415.301.311,00				29.415.301.311,00			
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				590.999.900,00	590.999.900,00				581.762.900,00			
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD				90.000.000,00	90.000.000,00				85.700.500,00			
Layanan Administrasi DPRD					382.068.500,00	382.068.500,00				382.068.500,00			
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100.068.500,00	100.068.500,00				89.300.000,00			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan				282.000.000,00	282.000.000,00				282.000.000,00			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan DPRD yang di publikasikan Persentase kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang				19.680.615.905,00	22.457.675.551,00				13.564.026.308,00			

		dilaksanakan sesuai rencana												
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun				3.640.702.530,00	6.272.330.500,00				6.272.330.500,00			
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.139.206.630,00	2.250.298.000,00				1.271.353.132,00			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen kajian Perundang - Undangan				505.302.500,00	2.533.852.500,00				1.835.174.300,00			
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi				996.193.400,00	1.488.180.000,00				755.529.600,00			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen anggaran				638.982.000,00	799.030.000,00				799.030.000,00			
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS				206.505.000,00	261.687.000,00				151.517.800,00			
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				206.505.000,00	261.691.000,00				156.239.800,00			
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				112.986.000,00	137.826.000,00				81.927.500,00			

Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				112.986.000,00	137.826.000,00				82.097.500,00			
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan				184.000.000,00	184.000.000,00				184.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				44.000.000,00	44.000.000,00				22.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				44.000.000,00	44.000.000,00				22.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				44.000.000,00	44.000.000,00				22.000.000,00			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				52.000.000,00	52.000.000,00				26.000.000,00			
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				3.338.000.000,00	3.363.938.751,00				3.363.938.751,00			
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD				2.927.000.000,00	2.927.000.000,00				2.201.606.800,00			

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				225.000.000,00	222.171.600,00				222.171.600,00			
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				186.000.000,00	214.767.151,00				164.258.326,00			
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi yang dapat ditindak lanjuti				1.685.225.700,00	1.685.225.700,00				1.685.225.700,00			
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun				125.000.000,00	125.000.000,00				85.164.800,00			
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1.560.225.700,00	1.560.225.700,00				1.388.409.850,00			
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase anggota DPRD yang difasilitasi				10.193.705.675,00	10.153.150.600,00				10.153.150.600,00			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10.193.705.675,00	10.153.150.600,00				5.076.575.300,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DPRD Tahun 2025 yang telah disusun sesuai dengan Renstra DPRD Tahun 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRD Tahun 2025 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025, DPRD terdiri dari 2 program 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 48.962.662.482,00

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPRD pada Perubahan Renja Tahun 2025 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja DPRD Tahun 2025 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 5 Juni 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001